

RESUME (PORTO FOLIO) RANCANGAN RKPD KOTA CIMAHI 2017

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA CIMAHI
2016**

I. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah Kota Cimahi dilakukan secara terencana dalam upaya menuju perkembangan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Cimahi. Upaya tersebut di susun dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada, dengan berpedoman pada UU 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan tahunan tersebut di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu tahapan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain daripada itu, RKPD Tahun 2017 juga merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2017 disusun melalui tahap penyelarasan dengan berbagai kebijakan Pembangunan Nasional dengan Nawacita yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019, dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMD Jawa Barat, baik yang bersifat *Common goals* Provinsi Jawa Barat maupun kebijakan tematik kewilayahan, serta Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Cimahi adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Kebijakan pembangunan Kota Cimahi pada Tahun 2017 yang merupakan Tahun Kelima dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017, merupakan tahap **Pemantapan**, yaitu tercapainya kondisi Pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar pada tahun 2017 sesuai dengan amanat RPJPD Kota Cimahi. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada upaya pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar.

Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 merupakan tahap pemantapan sekaligus konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada

bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaiannya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 (empat) tahun terakhir. Arah kebijakan pada sektor infrastruktur diarahkan pada pengembangan infrastruktur serta peningkatan cakupan pelayanannya. Pada sektor penataan ruang dan lingkungan hidup, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan serta perencanaan dan pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan. Sedangkan arah kebijakan pada bidang sosial budaya difokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatnya *good governance*.

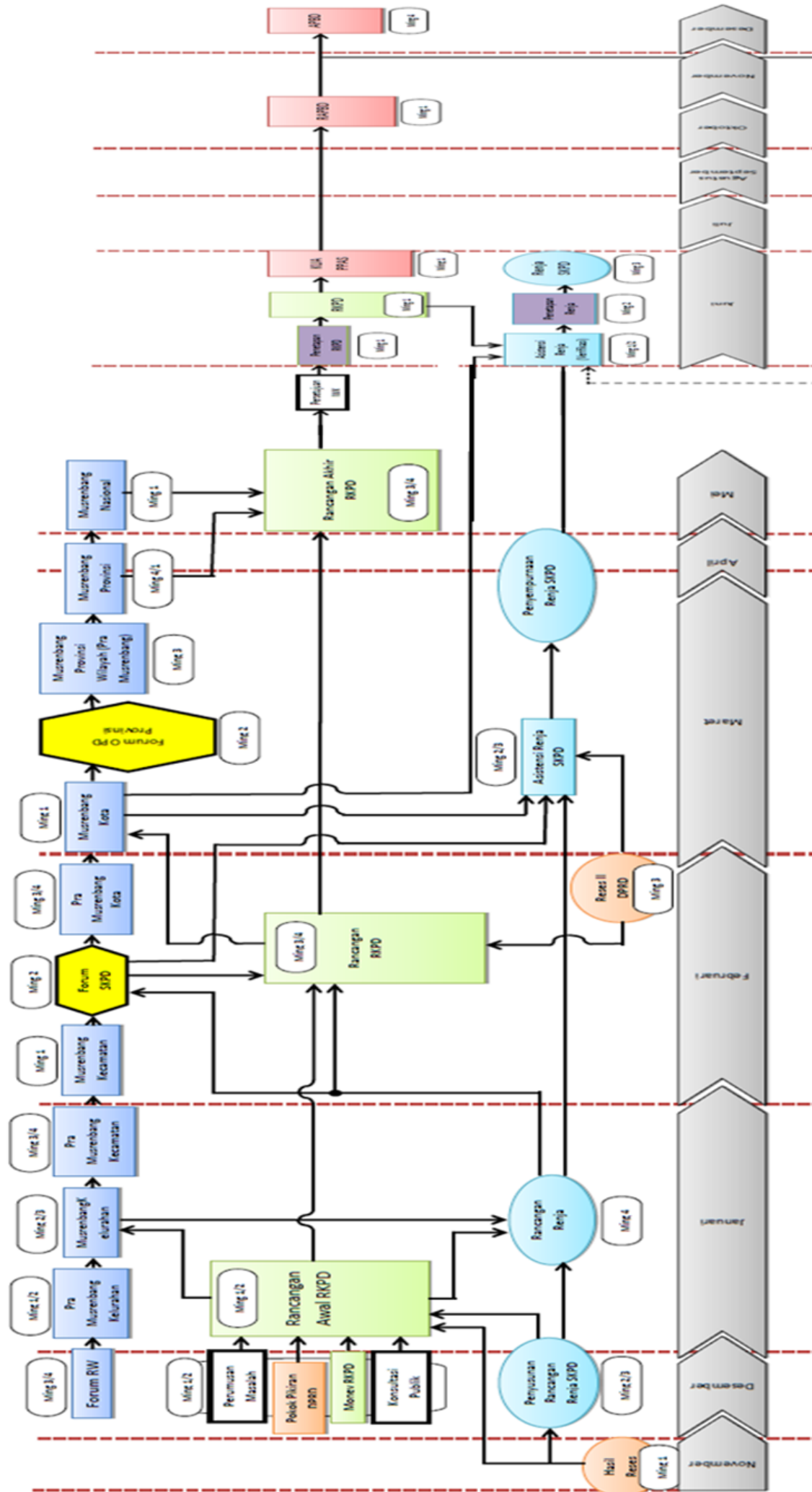
Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (baseline) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan jangka menengah pada periode Tahun 2017-2022. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian target kinerjanya.

Dalam Proses Penyusunan Rancangan RKPD digunakan pendekatan sebagai berikut:

- 1) **Pendekatan politik**, merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan yang berdasarkan kebijakan kepala daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD;
- 2) **Pendekatan teknokratik**, yaitu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor, dan lintas pelaku;
- 3) **Pendekatan partisipatif**, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan;
- 4) **Pendekatan atas-bawah (*top down*), dan bawah-atas (*bottom up*)**, dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.

Penyusunan RKPD merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah, yang mana dalam proses penyusunannya didahului oleh berbagai aktivitas lainnya seperti: Forum dialog RW, Musrenbang kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Kota. Selain itu juga memperhatikan rencana SKPD, arahan walikota, dan aspirasi dari Legislatif melalui mekanisme reses dan lainnya. Hal ini merupakan implementasi pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, Top Down dan Bottom Up. Secara lengkap siklus perencanaan pembangunan tahunan Kota Cimahi, termasuk penyusunan RKPD dapat dilihat pada gambar 1.1 Sedangkan Tahapan Proses Penyusunan RKPD berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 adalah diperlihatkan pada gambar 1.2 berikut :

SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA CIMAHI TAHUN 2017



Dokumen RKPD Kota Cimahi Tahun 2017 menjadi dasar untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017.

I.2 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dimaksudkan untuk menghasilkan suatu dokumen rencana tahunan yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun dokumen penganggaran (KUA, PPAS, dan RAPBD 2017), sehingga dapat mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 adalah :

- 1) Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kota Cimahi;
- 2) Mewujudkan pencapaian berbagai Program yang ada dalam RPJMD Kota Cimahi 2012-2017, dalam upaya
- 3) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- 4) Mengoptimalkan partisipasi
- 5) Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan , baik dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas melalui musrenbang, serta implementasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIMRENDAS)
- 6) Menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Cimahi dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Tahun 2017 agar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- 7) Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan daerah;

II. CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR PEMBANGUNAN KOTA CIMAHI

Pelaksanaan program dan kegiatan di Kota Cimahi turut mendukung pencapaian dari indikator makro pembangunan tersebut. Sebagai bagian dari siklus perencanaan, evaluasi telah dilakukan terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dimana hal tersebut tercermin dari capaian Indikator pembangunan di Bawah Ini:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Pembangunan Kota Cimahi

NO	INDIKATOR	Capaian 2014	TARGET 2017
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,06	76,70 - 77,38
2	Indeks Pendidikan	74.02	90,65 - 90,92
	Angka Melek Huruf (%)	99.80 - 99.83	99,83 - 99,86
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10.73 - 11.10	11.0 - 11.50
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)		
	Usia 7-12 tahun	99.64 - 99.8	99,80 - 100,00
	Usia 13-15 tahun	92.97 - 95	95,00 - 98,00
	Usia 16-18 tahun	68.69 -73	75 - 80
4	Indeks Kesehatan	82,41	74,25 - 74,75
	Angka Harapan Hidup (tahun)	73,56	69,65 - 70,05
5	Angka Kematian Ibu/ 100.000 KH	84.65 - 84.45	102/100.000 KH
6	Angka Kematian bayi/1.000 KH	29.70 - 29.30	23/1000KH
7	Indeks Daya Beli	72.15	65,28 - 66,59
	Daya Beli (Rp. Ribu)	644, 69	648 - 654
8	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,55	1.6 - 1.4
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		65.0 - 62.0
10	Pengangguran Terbuka (%)	10.30 - 9.00	9.5 - 9.0
11	Angka Kemiskinan (%)	5,63	7,00 - 4,90
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5.50 - 5.75	5.0 - 5,50
13	PDRB :		
	- Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rp)	16.953.226,64***)	9,4797158-9,501915
	- Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp)	20.568.719,92***)	26,50171-26,97918

Selain Target dan Capaian Indikator diatas dapat dilihat pula capaian Indikator Misi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012-2017 yang diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Indikator Misi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012-2017

INDIKATOR MISI RPJMD	CAPAIAN			TARGET 2017	Ket
	2012 (KONDISI AWAL)	2014	2015		
1	2	3		4	5
Misi 1 : Mewujudkan Kreativitas Dalam Segala Bidang					
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,3	11,43	10.30 - 9.00	8.0 - 7.0	
Angka Kemiskinan (%)	7.15	5,63	7.10 - 5.00	7.00 - 6.85	
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.56	5,18	5,50 - 5,75	5,75 - 6,00	
Misi 2 : Meningkatkan Kesetaraan Dalam Pelayanan Publik					
AMH (angka Melek Huruf)	99.80%	99.82	99.80 - 99.83	99.83% - 99.86%	
RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	10.73 tahun	10,76	10.73 - 11.10	11.10 - 11.47 tahun	
APS 7 - 12 tahun	99.64%	99,30%	99.64 - 99.8	99.80% -100%	
APS 13 - 15 tahun	92.97%	95,50%	92.97 - 95	95% - 98%	
APS 16 - 18 tahun	68.69%	77,32%	68.69 -73	73% - 78.31%	
AHH (Angka Harapan Hidup)	69.25 tahun	69,82	69.25 - 69.65	69.65 - 70.05 tahun	
Angka kematian ibu (AKI)	84,65	N/A	84.65 - 84.45	84.45 - 84.25	
Angka Kematian Bayi (AKB)	29,80	N/A	29.70 - 29.30	28,90 – 31,60	
Misi 3 : Meningkatkan Kemampuan Dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi Masyarakat Secara Cepat					
Kualitas pengelolaan e-government, reformasi birokrasi dan pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik	Tersedianya pengelolaan e-government, reformasi birokrasi dan pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik yang lebih terencana, tertata, efektif dan efisien	Ketersediaan egov di SKPD: KPDE, Bag Keuangan, Disdik, Disduk, Dinkes, KPPT, Adbang, Humas, Disnaker	Ketersediaan egov di SKPD: KPDE, Bag Keuangan, Disdik, Disduk, Dinkes, KPPT, Adbang, Humas, Disnaker	Kualitas pengelolaan e-government, reformasi birokrasi dan pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik yang lebih terencana, tertata, efektif dan efisien secara mantap	
	Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	1 SIM RS 1 SIM Puskesmas	1 SIM RS 1 SIM Puskesmas	Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Terintegrasi	
	1 portal sistem informasi terintegrasi	1 Portal di KPDE	1 Portal di KPDE	1 portal sistem informasi terintegrasi	
	Tersedianya 1 unit layanan pengadaan secara elektronik	1 Unit ULP	1 Unit ULP	Mantapnya layanan pengadaan secara elektronik	

INDIKATOR MISI RPJMD	CAPAIAN			TARGET 2017	Ket
	2012 (KONDISI AWAL)	2014	2015		
1	2	3		4	5
	Persiapan pelaksanaan sistem e-reporting untuk monev	e reporting (adbang)	e reporting (adbang)	Beroperasinya sistem e-reporting untuk monev	
Misi 4 : Mempertahankan Dinamika Perkehidupan Dalam Pembangunan					
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya Partisipasi masyarakat melalui peningkatan peran institusi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya Partisipasi masyarakat melalui peningkatan peran institusi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di dalam koridor semangat kemajuan bersama secara mantap	
Jumlah Kader Perencanaan Pembangunan	150 orang	175 org	175 org	312 orang	
Keberadaan Forum Komunikasi Kader Perencanaan Pembangunan	0	0	1 Forum	1 Forum	
Misi 5 : Mewujudkan Kesalehan Sosial Dalam Masyarakat Yang Berakhlak Mulia					
Peningkatan kemandirian, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Terpeliharanya kemandirian, ketentraman, dan ketertiban di dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan unsur heterogenitas dan aspek keadilan bagi bersama	Meningkatnya ketertiban, keamanan, perlindungan masyarakat, kerukunan umat beragama mulai tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota.	Meningkatnya ketertiban, keamanan, perlindungan masyarakat, kerukunan umat beragama mulai tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota.	Terpeliharanya kemandirian, ketentraman, dan ketertiban di dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan unsur heterogenitas dan aspek keadilan bagi bersama secara mantap	
Misi 6 : Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan					
Tingkat kemandirian jalan dan jembatan	92,77%	93,25% (kondisi baik dan sedang)	93,25% (kondisi baik dan sedang)	95%	
Menurunnya area genangan.	100%	86%	0,49%	24%	
Cakupan layanan air bersih	62,49%	62,92%	45,95%	69,7%	
Cakupan layanan kebutuhan pengelolaan air	64,65%	65,78%	65,78%	65,54%	

INDIKATOR MISI RPJMD	CAPAIAN			TARGET 2017	Ket
	2012 (KONDISI AWAL)	2014	2015		
1	2	3		4	5
limbah masyarakat					
Area permukiman kumuh	4,02%	3,96%	3,96%	1,54 %	
Penataan ruang yang komprehensif, integratif dan informatif	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	
sistem transportasi yang aman, efektif, efisien dan integratif melalui penyelenggaraan manajemen, penyediaan sarana prasarana dan sumberdaya manusia di bidang transportasi yang handal	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	
Cakupan layanan persampahan	65%	70%		80%	
Luasan RTH publik	18,31%	18,32%	18,32%	18,4%	
Pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	
Informasi Lingkungan Hidup	90,4%	91,20%	91,20%	94,3%	
Upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara dan lahan	22,3%	24,00%	24,00%	34.80%	

III. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk melihat permasalahan umum pembanguan Kota Cimahi, maka dilakukan dengan menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015, adapun permasalahan – permasalahan yang dihadapi Kota Cimahi meliputi permasalahan sosial budaya, ekonomi, infrastruktur kota dan permasalahan pemerintahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya aksesibilitas serta kualitas pendidikan dan kesehatan
2. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

3. Masih tingginya pertumbuhan penduduk
4. Masih rendahnya daya beli masyarakat dan tingginya kemiskinan serta pengangguran
5. Belum optimalnya layanan dan kualitas infrastruktur kota dan sinergitas antar wilayah
6. Belum optimalnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengendalian pemanfaatan ruang kota

Dari permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang telah diuraikan di atas dan dari hasil evaluasi pelaksanaan RKPD, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian melalui pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2017 sebagai berikut :

1. Pemerataan kualitas pendidikan
2. Pemerataan kualitas layanan kesehatan
3. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
4. Kurangnya daya saing masyarakat
5. Belum optimalnya reformasi birokrasi.
6. Tingginya kepadatan penduduk
7. Pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan
8. Peningkatan kualitas infrastruktur kota
9. Sinergitas pembangunan antar sektor dan wilayah belum optimal
10. Kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang yang sinergis dan berkelanjutan
11. Implementasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAHTAHUN 2017

IV.1 Visi dan Misi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012-2017

Penyusunan RKPD Kota Cimahi Tahun 2017 mengacu pada visi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 yaitu “**MENUJU CIMAHI CERDAS**”, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Creative** : yang berarti Cimahi dengan segala potensi dan karakter lokal dapat berkreasi sesuai dengan kondisi dan tuntutan umum;
- b. **Egaliter** : yang berarti menegakan kesetaraan dalam pelayanan publik;
- c. **Responsif** : yang berarti cepat tanggap dalam menghadapi segala tantangan dan pelayanan
- d. **Dinamis** : yang berarti mampu terus bergerak, berdenyut mengikuti dinamika kehidupan,

- e. **Agamis** : yang berarti menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam peri kehidupan dan mewujudkan keshalehan sosial;
- f. **Sinambung** : merupakan program-program berkelanjutan

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi, Misi adalah rumusan umum mengenai *upaya-upaya yang akan dilaksanakan* untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi 2012 -2017 tersebut akan dicapai melalui 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Mewudjudkan Kreativitas Dalam Segala Bidang;
2. Meningkatkan Kesetaraan Dalam Pelayanan Publik;
3. Meningkatkan Kemampuan Dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi secara cepat ;
4. Mempertahankan Dinamika Perkehidupan Dalam Pembangunan;
5. Mewujudkan Kesalehan Sosial Dalam Masyarakat Yang Berakhlak Mulia;
6. Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dan Keseimbangan.

Posisi perencanaan Tahun 2017 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 berada pada periode pembangunan jangka menengah tahap III yang merupakan periode pemantapan pembangunan. Hubungan visi/misi dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahap III yang sesuai dengan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 tergambar dalam pada bagan berikut ini :

Gambar 4.1
Pentahapan Pembangunan Daerah dalam Perencanaan Jangka Panjang Daerah



Adapun Pada Tahun 2017 dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012-2017 yang merupakan tahap **Pemantapan**, yaitu diharapkan dapat tercapaikondisi Pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang

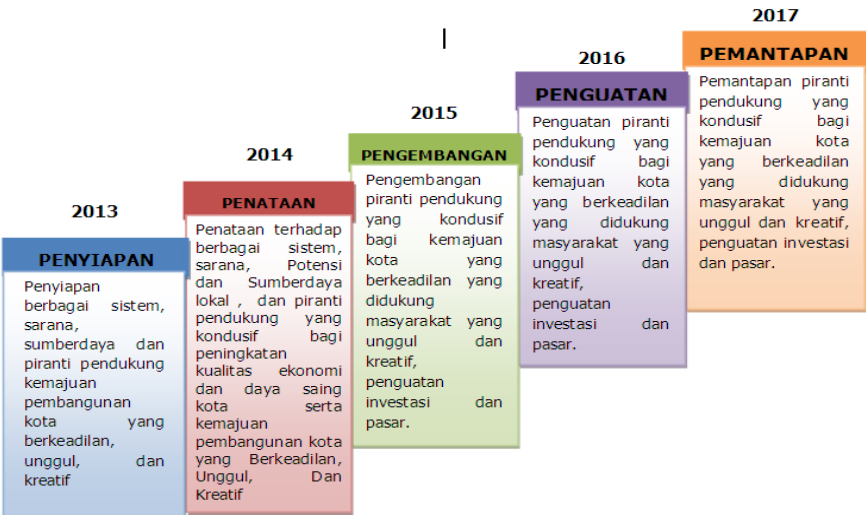
didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar pada tahun 2017 sesuai dengan amanat RPJPD Kota Cimahi. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan difokuskan pada upaya pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar.

Pada tahun 2017 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017, yang merupakan tahap pemantapan sekaligus konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 (empat) tahun terakhir.

Arah kebijakan pada sektor infrastruktur diarahkan pada pengembangan infrastruktur serta peningkatan cakupan pelayanannya. Pada sektor penataan ruang dan lingkungan hidup, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan serta perencanaan dan pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan. Sedangkan arah kebijakan pada bidang sosial budaya difokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatnya *good governance*.

Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (baseline) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode keempat pelaksanaan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian target kinerjanya.

Gambar 4.2
Pentahapan Pembangunan Daerah dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah



4.2 Prioritas dan Tema Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2017

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada. Prioritas Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan
2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
4. Pemantapan reformasi birokrasi dan Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia
5. Penanganan kepadatan penduduk dan kawasan kumuh
6. Pengembangan kewirausahaan dan kegiatan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM
7. Pengembangan kawasan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal (sentra-sentra)
8. Peningkatan promosi dan daya tarik kota
9. Pengurangan kemiskinan
10. Pemantapan kualitas infrastruktur kota
11. Peningkatan keterpaduan pembangunan antar wilayah
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang
13. Penguatan Sistem Inovasi Daerah
14. Implementasi PILKADA 2017

Dengan memperhatikan isu strategis dan prioritas pembangunan, Tema Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2017 adalah :

“PEMANTAPAN PENCAPAIAN DAN SINERGITAS PEMBANGUNAN MELALUI PENINGKATAN DAYA TARIK DAN DAYA SAING KOTA YANG DIDUKUNG DENGAN SUMBERDAYA UNGGUL SERTA PENINGKATAN KUALITAS SARANA PRASARANA KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”.

4.3 Sasaran Pembangunan

Sasaran dari Prioritas Pembangunan Tahun 2017 adalah seperti yang diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Sasaran Prioritas Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2017

PRIORITAS		SASARAN	
1	Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan	1	Meningkatkan mutu lulusan pendidikan
		2	Manajemen penyelenggaraan layanan pendidikan yang efektif dan efisien
		3	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
		4	meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan
2	peningkatan kualitas layanan kesehatan	1	Pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat
		2	Sinergitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		3	penguatan Peran serta masyarakat dalam usaha kesehatan berbasis masyarakat
		4	Meningkatkan kualitas PHBS
		5	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan
3	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	1	Meningkatan kemandirian dan peran institusi masyarakat dalam pembangunan
4	Pemantapan reformasi birokrasi dan Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia	1	Meningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat
		1	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
		2	Penataan dan revitalisasi birokrasi
5	Penanganan kepadatan penduduk dan kawasan kumuh	1	penanganan kumuh
		2	Peningkatan pelayanan adminitrasi kependudukan
		3	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya KB
6	Pengembangan kewirausahaan dan kegiatan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM	1	Penguatan Kewirausahaan berbasis teknologi dan pengetahuan bagi UMKM

PRIORITAS		SASARAN	
		2	Peningkatan Inovasi dalam proses produksi dan pemasaran pada IKM
		3	Optimalisasi penguatan komintas pelaku usaha
7	Pengembangan kawasan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal (sentra-sentra)	1	Penguatan rantai nilai mulai dari hulu hingga hilir berbasis potensi lokal, produk unggulan dan wilayah
		2	Pengembangan kluster jasa perdagangan
8	Peningkatan promosi dan daya tarik kota	1	Peningkatan promosi kota
		2	Peningkatan daya tarik investasi
9	Pengurangan kemiskinan	1	Pelayanan dan perlindungan sosial (kaum renta)
		2	Peningkatan ketrampilan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin
10	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	3	Peningkatan daya saing Kota Saing
11	Pemantapan kualitas infrastruktur kota	1	Peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan
		2	Pemenuhan kebutuhan permukiman
		3	Peningkatan pelayanan prasarana permukiman
		4	Peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi dan terpadu
		5	Peningkatan fasilitas komunikasi dan informasi
		6	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
		7	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana perekonomian
12	Peningkatan keterpaduan pembangunan antar wilayah	1	Peningkatan koordinasi dan kerjasama kelembagaan antar wilayah dan daerah

PRIORITAS		SASARAN	
		2	Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar sektor antar wilayah dan daerah
		3	Penataan batas wilayah di Kota Cimahi dan sekitarnya
13	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang	1	Pengembangan dan penataan RTH
		2	Perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, informatif, dan berkepastian hukum
		3	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
		4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
14	Implementasi PILKADA 2017	1	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan PILKADA 2017
		2	Stabilitas keamanan dan ketertiban PILKADA 2017

IV.4 Kebijakan Kewilayahan

Pada dasarnya pembangunan yang dilaksanakan di Kota Cimahi selama lebih dari satu dekade setelah otonomi, telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan kualitas wilayah yang ada di Kota Cimahi. Diharapkan setiap wilayah dapat berkembang sesuai potensi dan kondisi yang ada serta dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di masing-masing wilayah. Mengingat setiap wilayah memiliki potensi dan permasalahan tersendiri maka perlu di pertimbangkan adanya fokus pembangunan berdasarkan wilayah. Pengembangan kewilayahan ditandai dengan adanya penetapan pusat-pusat pelayanan baru, yang diharapkan dapat menjadi titik tumbuh perekonomian dan jasa lainnya, yang melayani sub-sub wilayah kota sesuai dengan pembagian dalam RTRW Kota Cimahi.

Fokus pembangunan daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, baik dalam konteks dalam wilayah Kota Cimahi, maupun dengan kota/kabupaten yang berbatasan, guna mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Kota Cimahi. Pembangunan infrastruktur ini juga dimaksudkan agar dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal berdasarkan pembagian klasternya, sehingga proses produksi dan distribusi dapat lebih efisien.

Penetapan kebijakan pengembangan kewilayahan Kota Cimahi juga tidak terlepas dari kebijakan kewilayahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam kebijakan pengembangan kewilayahan Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi termasuk kedalam WPP Priangan yang difungsikan sebagai bagian dari wilayah inti pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung serta merupakan simpul pelayanan jasa perkotaan bagi PKN Metropolitan Bandung. Hal ini telah tertuang dalam RTRW Kota Cimahi yang juga menjadi salah satu rujukan penyusunan RPJM Daerah Kota Cimahi.

Secara umum kebijakan pembangunan kewilayahan pada RPJM Daerah disesuaikan dengan kebijakan pengembangan struktur dan pengembangan kawasan pada RTRW Kota Cimahi. Kebijakan pengembangan struktur ruang Kota, terdiri :

- 1) Pengembangan wilayah melalui pembagian 5 (lima) Sub Wilayah Kota (SWK) sehingga lebih efisien;
- 2) Mendorong pengembangan kawasan-kawasan strategis kota;
- 3) Peningkatkan peran pusat-pusat pelayanan kota sesuai fungsi yang telah ditetapkan, yaitu Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan PusatLingkungan (PL);
- 4) Peningkatan fungsi Kota Cimahi dalam pengembangan KK Cekungan Bandung Raya sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industry non-polutif;
- 5) Penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan sarana dan prasarana wilayah yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota.

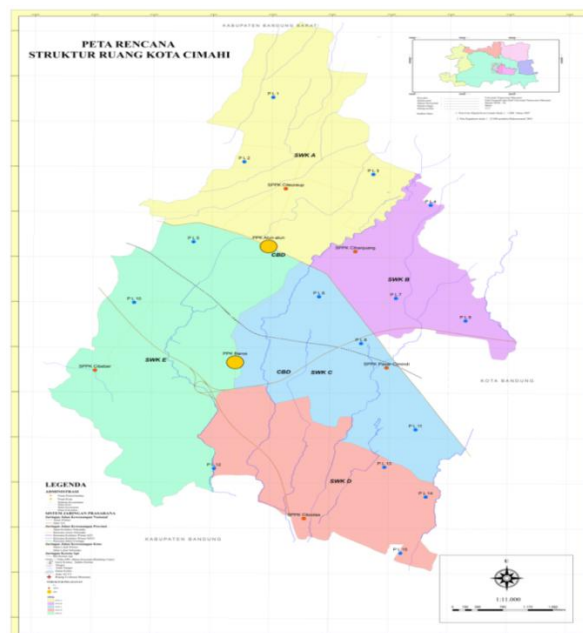
Sementara itu, kebijakan pengembangan kawasan strategis kota dilaksanakan melalui penetapan kawasan strategis lingkungan meliputi daerah rawan bencana alam dan RTH, kawasan strategis sosial budaya, serta kawasan strategis ekonomi di sepanjang koridor Jalan Nasional, Alun-alun dan Baros. Kepentingan pengembangan kawasan strategis ekonomi di kawasan Baros salah satunya adalah mensinkronkan kebijakan pusat yang sudah tercantum dalam RPJMN yaitu pembangunan kawasan *technopark*. Sedangkan untuk pengembangan kawasan strategis ekonomi di kawasan alun-alun diprioritaskan untuk pengembangan dan penataan sarana prasarana pendukung di kawasan tersebut seperti pengembangan sarana parkir bersama, penataan kios pasar atas, dan penataan terminal pasar atas. Untuk pengembangan RTH sendiri diprioritaskan untuk wilayah Cimahi Utara dengan mengintegrasikan dengan fungsi sarana rekreasi, olah raga, desa wisata dan kampung seni.

Selanjutnya dalam rangka mengefisiensikan pengembangan dan pembangunan di Kota Cimahi, pembagian wilayah ke dalam 5 (lima) sub wilayah kota (SWK) merupakan salah satu cara yang ditetapkan dalam RTRW. Masing-masing SWK

didelineasi berdasarkan kesamaan fungsi dan keterpaduan pelayanan. Pembagian wilayah SWK di Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

- 1) SWK A, mencakup Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cimahi dan sebagian Kelurahan Padasuka, dengan pengembangan wilayah terutama untuk perumahan, perkantoran, perdagangan jasa serta pengembangan kawasan pariwisata;
- 2) SWK B, mencakup Kelurahan Cibabat dan Kelurahan Pasirkaliki, dengan pengembangan wilayah terutama untuk perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa serta pendidikan tinggi;
- 3) SWK C, mencakup Kelurahan Karang Mekar, Kelurahan Cigugur Tengah dan Kelurahan Cibeureum dan sebagian Kelurahan Baros, dengan pengembangan wilayah terutama untuk perumahan, perkantoran, militer, perdagangan dan jasa, industri serta industri kreatif berbasis telematika;
- 4) SWK D, mencakup Kelurahan Melong, Kelurahan Utama, dan sebagian Kelurahan Leuwigajah, dengan pengembangan wilayah terutama untuk perumahan, perdagangan dan jasa serta industri; dan
- 5) SWK E, mencakup Kelurahan Cibeber, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Setiamanah, sebagian Kelurahan Leuwigajah dan sebagian Kelurahan Baros, dengan pengembangan wilayah terutama untuk perumahan, industri, perdagangan dan jasa, militer, pendidikan tinggi, dan pariwisata.

Gambar. 4.3
Peta Struktur Ruang



Disamping penjabaran strategi dari kebijakan kewilayahan pengembangan SWK, ada pula kebijakan pengembangan kawasan strategis kota. Penetapan kawasan strategis Kota Cimahi didasarkan pada kebijakan pengembangan kawasan strategis

Nasional yaitu KSN Cekungan Bandung dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis Provinsi Jawa Barat yaitu KSP Bandung Utara dengan sudut kepentingan lingkungan hidup. Berdasarkan kedua tinjauan tersebut, maka ditetapkanlah Kawasan strategis Kota (KSK) Cimahi yang terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu KSK yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan:

- 1) ekonomi;
- 2) sosial dan budaya; dan
- 3) fungsi dan daya dukung lingkungan.

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi :

1. Kawasan Perdagangan dan Jasa yang meliputi kawasan perdagangan dan jasa pusat kota serta kawasan perdagangan dan jasa pusat kota baru, yaitu:
 - a) kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Kota terletak di Alun-Alun Kota Cimahi meliputi Kelurahan Cimahi, Setiamanah dan Karang Mekar;
 - b) kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Kota Baru terletak di Baros meliputi Kelurahan Baros, Kelurahan Utama dan Kelurahan Cigugur Tengah.
2. Kawasan Industri
Kawasan Industri di Kota Cimahi meliputi Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Utama, dan Kelurahan Melong.

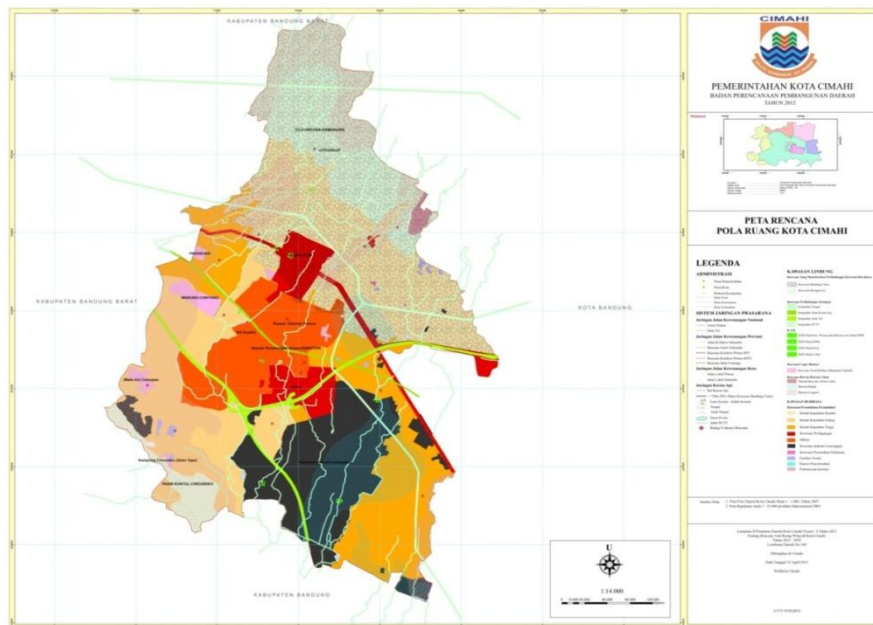
Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi :

- 1) Kampung Cireundeu sebagai wisata budaya lokal di Kelurahan Leuwigajah;
- 2) Situ Ciseupan sebagai objek wisata air di Kelurahan Cibeber;
- 3) Warung Contong sebagai objek ekowisata dan olahraga di Kelurahan Setiamanah;
- 4) Padasuka sebagai fasilitas olahraga (*veledrome*) di Kelurahan Padasuka;
- 5) Jalan Kolmas Citeureup sebagai wisata kampung seni di Kelurahan Citeureup.

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagai kawasan lindung meliputi :

- 1) dibagian selatan dari Pasir Kuntul di Kelurahan Cibeber sampai Cireundeu di Kelurahan Leuwigajah; dan
- 2) dibagian utara dari Cileuweung di Kelurahan Cipageran sampai Kamarung di Kelurahan Citeureup. Penetapan KSK ini diharapkan dapat menjadi arahan pengembangan kawasan khusus yang dinilai mempunyai daya dorong dan daya tarik untuk masing-masing fungsi khususnya. Oleh karena itu maka kebijakan dalam RPJM juga diarahkan untuk dapat menjadi tahapan yang bernilai bagiit erlaksananya rencana pemanfaatan dan pengendalian ruang yang tercantum dalam RTRW Kota Cimahi.

Gambar. 4.4
Pola Ruang Kota Cimahi



Selanjutnya, sebagai penjabaran detail dari kebijakan-kebijakan yang menyangkut kewilayahan maka disusunlah beberapa strategi dari masing-masing kebijakan tersebut, yang dikelompokkan berdasarkan pembagian wilayah Kecamatan seperti yang diuraikan dibawah ini:

A. Kecamatan Cimahi Utara

Secara topografis Kecamatan Cimahi Utara terdiri dari dataran yang memiliki tingkat kelandaian yang curam. Wilayah ini juga secara fungsional termasuk kedalam Kawasan Bandung Utara yang umumnya memiliki fungsi lindung sebagai kawasan resapan air. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian Kawasan Bandung Utara (KBU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Proivinsi Jawa Barat menjadikan wilayah Kecamatan Cimahi Utara mempunyai batasan dalam hal pengembangan fisik terutama yang bersifat ekstensif.

Oleh karena itu sebagai penjelasan turunan dari kebijakan kewilayahan Kota Cimahi, berikut ini diuraikan strategi-strategi yang ditetapkan untuk wilayah Kecamatan Cimahi Utara:

- 1) mengembangkan RTH kota;
- 2) mengendalikan perkembangan kegiatan perumahan sesuai dengan Peraturan perundangan yang mengatur pengendalian pemanfaatan ruang di KBU;
- 3) mengembangkan kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- 4) mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa yang sesuai dengan Peraturan perundangan yg mengatur pengendalian pemanfaatan ruang di KBU;
- 5) mempertahankan dan melindungi kawasan resapan air.
- 6) Mengendalikan perkembangan perumahan sesuai dengan Peraturan perundangan yang mengatur pengendalian pemanfaatan ruang di KBU;

- 7) Mengembangkan kawasan pendidikan tinggi;

B. Kecamatan Cimahi Tengah

Kecamatan Cimahi Tengah merupakan wilayah yang penggunaan lahan saat ini di dominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa, perumahan dan pusat pemerintahan (Kantor DPRD). Dalam perkembangannya, wilayah Kecamatan Cimahi Utara ini juga masih dipertahankan sebagai kawasan dengan fungsi utama yang sama. Satu yang menjadi focus baru adalah pengembangan pusat pelayanan kota yang baru di Baros. Pengembangan ini diharapkan bisa menjadi pusat baru yang mempunyai tingkat aksesibilitas tinggi karena berada di sekitar jalan akses menuju gerbang Tol Baros. Disamping itu Kota Cimahi juga telah memiliki Gedung Baros *Informasi Teknologi Creative* (BITC) yang menjadi pusat pengembangan telematika sebagai salah satu klaster yang menjadi unggulan Kota Cimahi.

Strategi-strategi yang direncanakan akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang;
- 2) Menata kawasan militer menjadi kawasan *heritage* kota; dan
- 3) Mengembangkan kegiatan jasa dan perdagangan yang menunjang perkembangan kegiatan di PPK Baros; dan
- 4) mengembangkan RTH kota.

Selain itu kegiatan lain yang menjadi prioritas di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah adalah penyediaan infrastruktur lingkaran selatan (*Flyover* Padasuka).

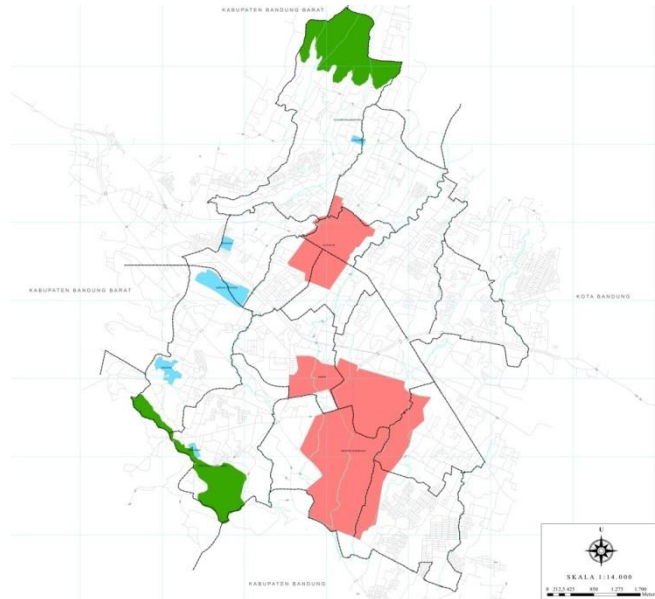
C. Kecamatan Cimahi Selatan

Melihat fungsi kawasan yang berada di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan saat ini yang masih ditandai adanya kawasan industri, perumahan serta perdagangan dan jasa. Isu peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian dalam perencanaan wilayah di Kecamatan Cimahi Selatan, terutama berkaitan dengan keberadaan industri-industri yang masih bersifat polutif dan konsumtif terhadap air. Dengan latar belakang kondisi tersebut maka disusun strategi pengembangan wilayah untuk Kecamatan Cimahi Selatan sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan dan melindungi kawasan resapan air;
- 2) Mengembangkan kegiatan pendukung perkembangan industri kreatif berbasis telematika di PPK Baros;
- 3) Mengembangkan RTH;
- 4) Mengendalikan perkembangan perumahan sesuai dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang;

- 5) Menatakawasan pariwisata berbasis lingkungan; dan
- 6) Menatakawasan militer menjadi kawasan *heritage* kota;

Gambar. 4.5
Kawasan Strategis



Selain itu kegiatan lain yang menjadi prioritas di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan adalah sinergitas penataan kawasan perbatasan Cimindi.

V. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

V.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Cimahi sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

- 1 Identifikasi sumber-sumber potensi pendapatan daerah baru;
- 2 Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan Pendapatan Daerah;
- 3 Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- 4 Meningkatkan koordinasi secara sinergis pada bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi;
- 5 Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka mendorong potensi Pendapatan Daerah;

- 6 Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam membayar pajak dan retribusi;
- 7 Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan asset daerah secara profesional;
- 8 Optimalisasi Penerimaan SKPD BLUD.

Dalam usaha untuk mencapai target kapasitas fiskal daerah, upaya-upaya pemerintah daerah yang ditempuh melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah, yaitu meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah dengan pendekatan sosialisasi dan penegakan sanksi peraturan perundang-undangan/peraturan daerah yang berlaku tentang pungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, yaitu melalui penataan administrasi objek potensi terkini dan rencana objek potensi akibat adanya pertumbuhan ekonomi;
- 4) Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- 5) Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- 6) Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan **Dana Perimbangan** sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN) dan PPh Pasal 21;
2. Meningkatkan akurasi data Potensi dan Sumber Daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

V.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai belanja yang diarahkan (*Earmark*), belanja yang bersifat mengikat/wajib, belanja yang ditentukan prosentasenya sesuai amanat perundang-undangan, belanja pemenuhan urusan sesuai dengan SPM dan belanja lainnya.

Belanja Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2012, pada dasarnya terdapat dua jenis belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Kebijakan belanja daerah diarahkan pada belanja publik yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan tetap meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan belanja.

Sumber pendanaan daerah selain dari APBD, juga dari Pemerintah Pusat (APBN) berupa Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang pengalokasiannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kota Cimahi serta dana yang bersumber dari swasta.

Melihat perkembangan dan realisasi dari belanja di atas, maka kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2017 ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui :

1. Alokasi anggaran untuk belanja pemenuhan urusan sesuai UU Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah;
2. Mendukung pencapaian SDGs, SPM serta Program Pembangunan Berkelanjutan (*Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor and Pro-Environment*);
3. Mendukung Kebijakan Nasional dalam Implementasi Pengembangan Teknopark, Akademi Komunitas (AKN), serta pengembangan infrastruktur kota ;
4. Alokasi anggaran untuk mendukung persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak;

5. Alokasi anggaran sesuai dengan perundang-undangan, dalam rangka peningkatan **Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Pengawasan**;
6. Alokasi anggaran dalam rangka peningkatan **Indeks Daya Beli**;
7. Alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja modal minimal;
8. Alokasi anggaran untuk Hibah dan Bantuan Sosial;
9. Alokasi anggaran yang diarahkan (**earmark**), antara lain : Dana Transfer Khusus dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.

Sumber pendanaan daerah selain dari APBD, juga dari Pemerintah Pusat (APBN) berupa Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang pengalokasiannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kota Cimahi serta dana yang bersumber dari swasta.

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai permasalahan kota cimahi dan hasil evaluasi capaian pembangunan, serta penentuan prioritas pembangunan daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017.

Program dan Kegiatan tersebut mencakup berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 yang pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan “*Operasional Pendukung Kinerja*” yang ada di setiap SKPD;
2. Program dan kegiatan yang mengacu pada Prioritas Walikota yang tercantum dalam RPJMD Kota Cimahi 2012-2017;
3. Program dan kegiatan yang mendukung Prioritas Kota Cimahi Tahun 2017;
4. Program dan kegiatan yang mendukung kebijakan pusat;
5. Program dan kegiatan yang mendukung kebijakan Provinsi Jawa Barat.

VI.1 Program Dan Kegiatan Prioritas Dalam RPJMD

Rencana Pembangunan Tahun 2017 yang ada dalam RKPD Kota Cimahi tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012-2017, oleh karena Program prioritas Walikota yang ada di RPJMD tersebut menjadi bagian prioritas yang harus dilaksanakan pada tahun 2017. Program dan Kegiatan Prioritas Walikota yang tercantum dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012-2017 terdiri dari 11 program prioritas dengan indikasi kegiatan Sebagai berikut :

Tabel. 6.1
Program Prioritas Dalam RPJMD

PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA		INDIKASI KEGIATAN
1	Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan	1) Perluasan akses Pendidikan gratis (pendidikan dasar) dan murah (pendidikan menengah)
		2) Peningkatan mutu pendidikan
		3) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru
		4) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
		5) pengembangan model kurikulum “budaya kreatif” dan menjunjung budi pekerti
2	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan	6) <i>Universal Coverage</i> (Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal)
		7) Peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas dan RSUD Cibabat
		8) peningkatan kualitas pelayanan tenaga kesehatan (Pelayanan dengan hati, Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun)
		9) Puskesmas pelayanan prima, Puskesmas santun lansia, Puskesmas sayang ibu, Puskesmas ramah anak, Konseling kesehatan berbasis agama
		10) peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan (DBD, TBC, Kanker, LBS, PHBS)
3	Pengembangan Ekonomi Lokal dan peningkatan Iklim Investasi	11) Pengembangan klaster
		12) Pembangunan sentra-sentra ekonomi local
		13) Membangun gerai-gerai sebagai pusat pemasaran
		14) Mengembangkan kemitraan antar pelaku usaha
		15) Aksesibilitas permodalan bagi pelaku ekonomi lemah
		16) Menciptakan wirausaha baru di segala bidang
		17) Pengembangan ekonomi berbasis keluarga (Warung umat/ warung RW)
		18) Pengembangan Online System
		19) Peningkatan pelayanan perijinan, pajak dan retribusi
		20) Penciptaan kondisi sosial yang kondusif
4	Infrastruktur tata ruang dan lingkungan Hidup	21) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur kota
		22) Pengembangan Fasilitas keagamaan
		23) Peningkatan Sarana prasarana transportasi
		24) Pengembangan sarana prasarana pendukung pusat kegiatan ekonomi
		25) Pembangunan Embung dan drainase
		26) pengendalian banjir
		27) Optimalisasi Pengelolaan sampah

PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA		INDIKASI KEGIATAN
		28) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang public
		29) Pengembangan Water Treatment
		30) Fiqih Lingkungan
		31) Peningkatan daya dukung kawasan pemukiman padat
		32) Pembangunan Septic tank komunal
		33) Peningkatan Jalan lingkungan
		34) Bedah rumah
		35) Pengembangan RW hijau
		36) Peningkatan Pelayanan PJU
		37) Peningkatan tertib lalu lintas dan Rekayasa lalu lintas
		38) Penyediaan dan pemasangan Rambu dan marka jalan
		39) Penataan perparkiran
5	Pengembangan Sumber Air Baku	40) peningkatan pelayanan air bersih untuk masyarakat (Air untuk semua)
		41) Penataan sumber air baku
		42) Pembangunan Sumur resapan
6	Peningkatan kualitas kinerja aparaturnya	43) Pelayanan KTP Gratis
		44) Percepatan pelayanan administrasi kependudukan
7	Perluasan Kesempatan Kerja	45) Penyelenggaraan Bursa kerja
		46) Fasilitasi Pemagangan bagi pencari kerja
		47) Penyiapan tenaga kerja siap pakai
		48) Fasilitasi perlindungan tenaga kerja
		49) Optimalisasi pelaksanaan Padat karya
	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	50) Peningkatan kualitas keluarga
		51) Pembentukan Kota Layak Anak
		52) Peningkatan pelayanan bagi kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus
		53) Optimalisasi peran P2TP2A dalam pencegahan dan penanganan KDRT dan <i>Trafficking</i>
		54) Pemberdayaan keluarga (bina keluarga. PEKKA) dan KB
		55) Peningkatan ekonomi keluarga (Sekolah Jumat, UP2K)
9	Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga	56) Peningkatan kepemimpinan kepemudaan
		57) Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan
		58) Pembinaan pemuda unggulan

PROGRAM PRIORITAS WALIKOTA		INDIKASI KEGIATAN
		59) Optimalisasi Fasilitas sarana dan prasarana olahraga
		60) Pembinaan olahraga berprestasi
10	Penanganan Bencana dan Masalah Sosial	61) Pemberian bantuan bagi penyandang masalah kesejahteraan social
		62) Pembinaan anak terlantar dan anak jalanan melalui Rumah Pintar
		63) Penanggulangan bencana alam (Sibat)
		64) Penanganan penyakit masyarakat
11	Peningkatan Inovasi dan Teknologi	65) Peningkatan Kemitraan dengan perguruan tinggi dan instansi vertikal dalam bidang IPTEK
		66) Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna
		67) Fasilitasi pengembangan industri kreatif (telematika, animasi)

VI.2 Kegiatan Prioritas Tahun 2017

Berdasarkan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017 dan Program Pembangunan Tahun 2017, dirumuskan beberapa kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

I BIDANG FISIK

1. Peningkatan kualitas jalan, trotoar dan drainase
2. Pengembangan transportasi massal yang terintegrasi
Peningkatan akses sanitasi, penanganan kawasan kumuh, dan peningkatan akses
3. air bersih (100 – 0 -100)
4. Pembangunan Ruang Publik Kreatif *)
5. Peningkatan Infrastruktur Teknopark Kota Cimahi
6. Pengembangan fungsi RTH *), Revitalisasi Taman Kota dan Cimahi Baranang,
7. Penataan kawasan fly over Padasuka
8. Pembuatan TPST, Bank Sampah dan Reaktor Sampah Mini
9. Pembangunan Under Pass di Cimahi Tengah
10. Pembangunan double track jembatan Leuwigajah
11. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
12. Pengembangan sarana olahraga terpadu
13. Pengembangan infrastruktur komunikasi dan informasi

II BIDANG SOSIAL BUDAYA

1. Pemerataan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
3. Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya
4. Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
5. Akademi Komunitas Negeri *)
6. Penanganan PMKS
7. Link & Match Pendidikan dan Pelatihan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri *)
8. Pemberdayaan Masyarakat
9. Perluasan kesempatan kerja *)

III BIDANG PEMERINTAHAN

1. Peningkatan kebangsaan dan solidaritas
2. Peningkatan lembaga kemasyarakatan
3. Pembangunan data centre terintegrasi
4. Revitalisasi Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan
5. Pengendalian Kependudukan
6. Penyusunan Standar Pelayanan Publik
8. Penegakkan Peraturan Daerah
9. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah
10. Penataan Batas Wilayah Melalui Mekanisme Koordinat
11. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi *)
12. Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.

IV BIDANG EKONOMI

1. Optimalisasi Teknopark Kota Cimahi
2. Penguatan Kewirausahaan berbasis teknologi dan pengetahuan bagi UMKM dan koperasi
3. Pengembangan kawasan berbasis potensi lokal (sentra-sentra) *)
4. Pengembangan inovasi produk pada klaster-klaster *)
5. Penggunaan teknologi produksi tepat guna ramah lingkungan *)
6. Pengembangan klaster perdagangan

VII. PENUTUP

RKPD Kota Cimahi Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2012-2017. RKPD tahun 2017 ini merupakan RKPD tahun terakhir pada RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012-2017. Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam RKPD Kota Cimahi Tahun 2017, seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran”, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

RKPD Kota Cimahi Tahun 2017 menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Renja SKPD Kota Cimahi Tahun 2017 maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Pembangunan daerah Kota Cimahi dilakukan secara terencana dalam upaya menuju perkembangan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Cimahi. Upaya tersebut di susun dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu tahapan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan melalui tahap penyelarasan dengan berbagai kebijakan Pembangunan Nasional dengan Nawacita yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019, kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMD Jawa Barat 2013-2018, baik yang bersifat *Common goals* maupun kebijakan tematik kewilayahan.

Penyusunan RKPD merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah, yang mana dalam proses penyusunannya dimulai dari: Forum dialog RW, Musrenbang tingkat kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kota. Selain itu juga memperhatikan renja SKPD, arahan walikota, dan aspirasi dari Legislatif melalui mekanisme reses serta kebijakan dari pusat. Hal ini merupakan implementasi pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, Top Down dan Bottom Up.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 bertujuan untuk menghasilkan suatu dokumen rencana tahunan yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun dokumen penganggaran (KUA, PPAS, dan RAPBD 2017), serta meningkatkan transparansi, partisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas melalui musrenbang.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah akan mencapai pada akhir tahap pendekatan partisipatif yang rencananya:

1. Pada tanggal 27 Februari 2016 akan dilaksanakan Pra musrenbang tingkat Kota Cimahi yang bertempat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Jalan Rd. Demang Hardjakusumah – Cimahi.
2. Pada tanggal 3 Maret 2016 akan dilaksanakan musrenbang RKPD Kota Cimahi yang bertempat di Pusdik Armed Jalan Baros No. Cimahi.

Bagi masyarakat Kota Cimahi yang akan memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun dapat menyampaikannya melalui email bappeda@cimahikota.go.id. Hasil dari musrenbang partisipatif ini akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Semoga apa yang telah dilaksanakan bersama-sama selama ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Cimahi. Amiiin...